

Warga Gang Barjo Bogor Menolak Direlokasi

BOGOR (IM)- Warga Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat menolak direlokasi, meski wilayahnya masuk ke dalam zona hitam atau rawan bencana untuk ditinggali.

Warga Gang Barjo bernama Dian (40), mengaku sudah menetap di wilayah tersebut selama puluhan tahun. Dia memilih menetap di Gang Barjo karena sudah merasa nyaman, meski wilayahnya masuk ke zona hitam bencana.

Lokasi rumah Dian yang dinilai strategis juga menjadi alasannya tak ingin direlokasi. "Udah enak di sini, kemana-mana dekat," ucap Dian, Kamis (22/2).

Hal serupa juga dikatakan oleh salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Ia berujar tidak ingin direlokasi karena merasa bingung memikirkan lokasi tempat tinggal yang baru. "Enggak mau direlokasi, mau kemana lagi," ujarnya.

Ahmad Nizar selaku Ketua RW 02 mengatakan, kemungkinan warga menolak untuk direlokasi karena bangunan rumah sudah memiliki sertifikat tanah secara resmi. Nizar mengatakan, sudah ada iimbauan yang dilyangkan Pemerintah Kota Bogor untuk merelokasi warga. Namun, sampai saat ini pelaksanaan relokasi tak kunjung diimplementasikan.

"Sebagian warga sudah memiliki sertifikat hak milik. Untuk relokasi sudah, namun pelaksanaannya belum," ucap Nizar. ● **jai**

Dishub Kab. Bogor Kejar Target Peresmian Beroperasinya Bus BTS

CIBINONG (IM)- Dinas Perhubungan (Dishub Kabupaten Bogor) terus berkordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk bisa meresmikan beroperasinya angkutan umum bus Buy The Service (BTS) di akhir Bulan Februari ini.

"Mudah-mudahan, di akhir Bulan Februari ini kita segera meresmikan pengoperasian bis BTS koridor I, yaitu Cibinong-Ciparigi. Saat ini, kami terus berkoordinasi dan kordinasi dengan BPTJ," ungkap Kabid Angkutan Dishub Kabupaten Bogor, Sapari kepada wartawan, Rabu (21/2).

Sapari menuturkan bahwa jajaran Dishub Kabupaten Bogor masih menyiapkan kesiapan personel, sarana prasarana utilitas dari bus BTS tersebut.

"Sarana prasarana dan lainnya terkait bus BTS kami sedang siapkan, termasuk mengantisipasi adanya dampak sosial akan beroperasinya angkutan umum massal dan

modern tersebut," tutur Sapari.

Selain menyiapkan sarana prasarana di Terminal Cibinong untuk armada bus BTS, ia juga sedang membangun halte-halte tempat pemberhentian sementara bus BTS.

"Nantinya, bus BTS ini akan dinamakan bis kita sama dengan Kota Bogor karena ini program Kementerian Perhubungan. Bis kita akan berhenti di terminal dan halte tertentu saja," sambungnya.

Pria berjenggot itu menjelaskan bahwa di Kabupaten Bogor, nantinya ada 7 koridor, di antaranya Cibinong-Ciparigi, Ciawi-Cisarua, Ciawi-Cigombong, Ciawi-Baranangsiang, Bojonggede-Sentul, Laladon-Leuwiliang dan Cileungsi-Harjamukti Depok.

"Nantinya, personel armada bus BTS tersebut akan disiapkan oleh BPTJ. Tugas kita hanya menyiapkan anggaran untuk kajian, pembangunan sarana prasarana dan antisipasi dampak sosialnya," jelas Sapari. ● **gio**

Pemkab Bogor Bangun Sinergi Kesetaraan dan Keadilan Gender



Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin.

CIBINONG (IM)- Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) membangun sinergi untuk kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Bogor.

Demikian inti rapat koordinasi (Rakor) Pengarusutamaan Gender, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (21/2).

Rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin. Hadir sebagai narasumber dari Pusat Kajian Gender dan Anak IPB University. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan jajaran Pemkab Bogor.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin menjelaskan, Pemkab Bogor terus berupaya meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bogor dan Per-

aturan Bupati nomor 78 tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

"Upaya untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang menjadikan kebijakan, program dan pembangunan menjadi kurang tepat sasaran," ungkap Burhanudin.

Burhanudin meminta agar rakor ini dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun sinergi yang harmonis antar stakeholder dan perangkat daerah, sehingga seluruh perangkat daerah dapat memahami dengan baik tugas dan fungsi serta perannya sesuai dengan batasan kewenangannya masing-masing dalam upaya pengarusutamaan gender di Kabupaten Bogor.

"Saya ucapkan terimakasih kepada narasumber yang telah berkenan hadir untuk memberikan pencerahan kepada para stakeholder Kabupaten Bogor dalam merumuskan gender action untuk meningkatkan capaian target pembangunan dan pemberdayaan gender di Kabupaten Bogor," ucap Sekda Burhanudin. ● **gio**

8 | Nusantara



DISTRIBUSI BERAS SPHP DI BOGOR

Petugas melayani warga yang membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat didistribusikan di Pabuaran, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/2). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah berusaha menjaga stabilitas harga beras secara nasional salah satunya dengan terus mendistribusikan beras SPHP yang diproduksi Bulog.

UNTUK BANTU MASYARAKAT DAN TEKAN INFLASI

Catat! DKP Kab. Bogor Jual Pangan Murah di 17 Titik

Tahap pertama gerakan pangan murah ini digelar di Kecamatan Cibinong, Citeureup, Babakan Madang, Klapanunggal, Jonggol, Sukaraja, Bojonggede, Tajur Halang, Rancabungur, Dramaga, Ciomas, Caringin, Cijeruk dan Megamendung. Setelah itu, gerakan pangan murah ini digelar di 26 kecamatan lainnya.

CIBINONG (IM)- Untuk membantu warga sekaligus menekan inflasi, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor menggelar gerakan pangan murah di 17 titik di 14 kecamatan. Di mana saja?

Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan DKP Kabupaten Bogor, Sutriana kepada wartawan, Kamis (22/2), menyebutkan ada 17 titik di 14 kecamatan yang disambangi gerakan pangan murah.

Pada tahap pertama, sebut Sutriana, gerakan pangan murah digelar di Kecamatan Cibinong, Citeureup, Babakan Madang,

Klapanunggal, Jonggol, Sukaraja, Bojonggede, Tajur Halang, Rancabungur, Dramaga, Ciomas, Caringin, Cijeruk dan Megamendung. "TPID Kabupaten Bogor yang dipimpin Bupati Bogor sudah memprediksi bakal ada inflasi," ujar Sutriana.

Tahap pertama ini, sebutnya, dilakukan hingga sebelum Hari Raya Idul Fitri. Setelah itu, nantinya DKP juga akan melaksanakan gerakan pangan murah di 26 kecamatan lainnya.

Di setiap pelaksanaan gerakan pangan murah, lanjut pria asal Bandung

tersebut, DKP menyiapkan daging ayam sebanyak 111 ekor, daging sapi 100 kg, telur ayam 175 kg, gula pasir 125 kg, minyak goreng 650 liter, bawang merah, bawang putih, cabe merah keriting, cabe merah besar dan cabe rawit merah kami siapkan masing-masing sebanyak 20 kg.

"Harga komoditas yang kami jual di gerakan pangan murah itu lebih murah Rp 2 ribu hingga 30 ribu, seperti daging sapi Rp 130 ribu menjadi Rp 100 ribu perkilogram. Lalu, bawang merah dan bawang putih dijual Rp 10.500 dan Rp 14.500 per500 gram, sedangkan daging ayam dijual Rp 26 ribu perekor," lanjut Sutriana.

Pemkab Bogor pun dengan gerak cepat menyiapkan anggaran untuk "mensubsidi" harga pangan atau bahan pokok tersebut dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024.

Dengan anggaran kurang lebih Rp400 juta, Pemkab Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) pun melakukan gerakan lainnya melonjak, pi-

murah di sejumlah kelurahan maupun kecamatan.

Sudah Cium Kenaikan Harga Pangan

Terjadinya inflasi di sejumlah komoditas pangan atau bahan pokok seperti beras sudah diprediksi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bogor.

Pemkab Bogor pun dengan gerak cepat menyiapkan anggaran untuk "mensubsidi" harga pangan atau bahan pokok tersebut dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024.

Dengan anggaran kurang lebih Rp400 juta, Pemkab Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) pun melakukan gerakan pangan murah di sejumlah kelurahan maupun kecamatan.

"TPID Kabupaten Bogor yang dipimpin Bupati Bogor sudah memprediksi bakal ada inflasi," ujar Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan DKP, Sutriana kepada wartawan, Kamis (22/2).

Oleh karena itu, ketika harga beras dan komoditas pangan lainnya melonjak, pi-

haknya dengan dana yang bersumber dari APBD Tahun 2024 langsung melaksanakan gerakan pangan murah.

Sutriana menuturkan bahwa anggaran sebesar Rp400 juta digunakan untuk membiayai transportasi truk yang membawa komoditas pangan seperti Gudang Bulog, Badan Pangan Nasional, BPD Agro, kelompok tani dan instansi lainnya yang terlibat dalam mensukseskan gerakan pangan murah.

"Jadi kita bukan mensubsidi harga komoditi bahan pokok, tetapi semua akomodasi jasa transportasi, pengemasan hingga pelaksanaan gerakan pangan murah kami yang menanggung," katanya.

Dengan begitu, harga bisa ditekan, lalu masyarakat bisa lebih murah dalam membeli 12 komoditas pangan.

Adapun 12 komoditas itu yakni beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, daging sapi, daging ayam, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabe rawit merah dan aneka sayuran. ● **gio**

Pemkab Bogor Perkuat Sinergi dengan Dinas Bina Marga Provinsi Jabar

CIBINONG (IM)- Pemerintah Kabupaten Bogor Guna memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait optimalisasi penanganan masalah infrastruktur jalan di Kabupaten Bogor.

Untuk itu, Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu melakukan kunjungan kerja ke Dinas Bina Marga dan Penata Ruang Provinsi Jawa Barat, Rabu (21/2). Dalam kunjungan kali ini Pj. Bupati Bogor membahas dua hal penting berkaitan dengan pengelolaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bogor.

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menjelaskan bahwa melalui kunjungan kerja ini ada dua hal penting yang menjadi pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pertama terkait dengan bagaimana rencana penangan jalan yang ada di Kabupaten Bogor yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi penanganan jalan khusus tambang.

"Pemerintah Kabupaten Bogor, melaksanakan silaturahmi, dan alhamdulillah beberapa hal yang kami sampaikan mendapat respon baik paling tidak tahun 2024 beberapa titik akan menjadi prioritas perbaikan penangan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Bina Marga. Saya pikir ke depannya hal-hal semacam ini akan terus kita perkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jabar," ujarnya.

Hal ini penting karena Pemerintah Kabupaten Bogor tidak bisa terpisah dalam sistem pemerintahan negara dengan

Pemprov Jabar, karena Pemerintah Provinsi itu adalah orang tua dari Pemerintah Kabupaten," jelas Asmawa Tosepu.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono mengatakan, banyak hal yang didiskusikan bersama Pj. Bupati Bogor untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di subsektor kebinamargaan yang lebih khusus lagi adalah tentang bagaimana akselerasi pembangunan jalan yang ada di Kabupaten Bogor.

"Insya Allah dengan diskusi yang sangat produktif ini kita bisa kolaborasi, bisa mengakselerasi pembangunan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya buat warga Kabupaten Bogor," tandasnya. ● **gio**



Pemkab Bogor memperkuat sinergi dengan Dinas Bina Marga Provinsi Jabar untuk penanganan infrastruktur.

60 Rumah Rusak Parah Diterjang Puting Beliu

BANDUNG (IM)- Sebanyak 60 rumah di Kampung Pangsor, Desa Nanjung Mekar, Rancaekek, Kabupaten Bandung, mengalami kerusakan yang parah setelah diterjang puting beliung pada Rabu (21/2).

"Sebanyak 60 rumah mengalami rusak berat akibat angin kencang, ditambah banyak material pabrik yang merusak bagian atap rumah warga karena terbawa oleh angin," ujar Ketua RT 04 Kampung Pangsor, Aep Saepuloh, Kamis (22/2).

Aep menambahkan, warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat puting beliung kini memilih mengungsi ke rumah saudara. "Dari malam yang mengungsi sudah banyak karena rumahnya tidak dapat ditempati untuk istirahat, sehingga mengungsi ke saudaranya," ungkapnya.

Akibat puting beliung, sebanyak dua orang warga dilarikan ke rumah sakit, karena mengalami luka terkena reruntuhan puing rumah. "Korban ada dua orang, satu sedang dirawat di rumah sakit karena ketuban puing," tegasnya.

Sementara itu menurut data dari BPBD Kabupaten Bandung dampak dari angin puting beliung sendiri mengakibatkan 213 rumah rusak berat dari total kerusakan 392 rumah di Desa Nanjung Mekar, Kabupaten Bandung

Bagaimana Nasib Rekap Pemilu?

Angin puting beliung itu juga menyebabkan kerusakan di beberapa wilayah salah satunya gudang logistik PPK di Kecamatan Cicalengka yang

menyimpan logistik Pemilu.

Wakapolresta Bandung AKBP Marully Pardede didampingi Kabag Ops Polresta Bandung meninjau lokasi yang terdampak puting beliung. Salah satunya adalah gudang logistik PPK yang berada di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung.

"Salah satu wilayah yang terdampak adalah Kecamatan Cicalengka, yakni di Gudang Logistik PPK. Makanya kami melakukan pengecekan dan membantu menginventarisir," kata Marully, Kamis (22/2).

Dikatakan Marully, gudang PPK tersebut, rusak di bagian atas hingga mengakibatkan kebocoran. "Memang pada saat rekapitulasi dilakukan bencana terjadi dan ruangan tersebut terkena dampaknya berupa bocor," katanya.

Untungnya, sebut Marully, kondisi logistik Pemilu di Gudang PPK Cicalengka yang di dalamnya menyimpan logistik dari 12 desa itu masih aman. Saat ini, logistik surat suara sudah diamankan di gudang yang lebih steril. Sehingga logistik surat suara pemilu 2024 di Gudang PPK Cicalengka dalam keadaan kondisi aman.

Namun, karena kondisi bocor dan tidak adanya aliran listrik, rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 di Gudang PPK Cicalengka dihentikan sementara.

"Sementara malam tadi itu ditunda dulu, hari ini mungkin akan dilakukan konsolidasi lagi dari pihak PPK termasuk KPU beserta Bawaslu," ujarnya. ● **pra**